

ARAH KEBIJAKAN LUAR NEGERI AMERIKA SERIKAT DI BAWAH PRESIDEN JOE BIDEN

7

Lisbet

Abstrak

Di bawah kepemimpinan Presiden Joe Biden, Amerika Serikat (AS) diharapkan dapat kembali menjadi aktor utama politik dunia. Hal ini dikarenakan pada masa kepemimpinan Presiden Donald Trump, AS mengambil arah kebijakan luar negeri unilateralisme dengan menggunakan semboyan "America First" sehingga AS sering terlibat perselisihan dengan sekutu-sekutu AS. Tulisan ini menganalisis arah kebijakan luar negeri AS pada era kepemimpinan baru di bawah Biden. Sumber acuan di dalam penulisan ini yaitu naskah pidato Presiden Biden. Di bawah kepemimpinan Presiden Biden, AS mengambil arah kebijakan luar negeri multilateralisme yang menekankan pada diplomasi. Selain itu, harapan untuk meningkatkan potensi kerja sama Indonesia-AS pada masa pemerintahan Presiden Biden akan semakin banyak, seperti penguatan nilai mata rupiah, peningkatan investasi di sektor ekonomi, industri alat kesehatan, dan sektor pertahanan.

Pendahuluan

Pada tanggal 20 Januari 2021 telah dilantik Presiden Amerika Serikat (AS) yang baru, yakni Joseph Robinette Biden Jr (Joe Biden). Di bawah Presiden Joe Biden, AS diperkirakan akan kembali ke arah kebijakan luar negeri AS yang lama, yaitu kebijakan multilateralisme yang menekankan pada diplomasi. Kebijakan ini dianggap penting oleh dunia karena pada masa kepemimpinan Presiden AS Donald Trump, AS dianggap mengalami kemunduran akibat kebijakan luar negeri AS yang menekankan pada unilateralisme sehingga AS kehilangan kredibilitasnya sebagai

aktor utama dalam politik dunia.

Dengan kebijakan unilateralismenya, AS di bawah Presiden Trump keluar dari berbagai badan dunia dan aliansi. Oleh karena itu, Presiden AS yang baru, Joe Biden, berkomitmen untuk melakukan pembaruan aliansi dan menormalisasi hubungan AS dengan sejumlah negara sekutu, khususnya dengan negara Uni Eropa dan Pakta Pertahanan Atlantik Utara. Meskipun kebijakan luar negeri pemerintahan Biden adalah multilateralisme yang menekankan pada diplomasi, namun bukan berarti nantinya AS



akan sibuk mencampuri urusan negara lain.

Selain itu, di bawah Presiden Biden, kebijakan multilateralisme juga akan menjadi pilihan dalam mengatasi isu lingkungan dan ekonomi. Presiden Biden telah menyampaikan rencananya untuk mengakhiri emisi karbon termasuk melalui alokasi 2 triliun dollar AS untuk sektor energi bersih (*clean energy*). AS juga akan kembali ikut serta dalam Kesepakatan Iklim Paris dan bergabung kembali dengan Organisasi Kesehatan Dunia.

Komitmen Presiden Biden untuk membawa AS kembali ke Kesepakatan Paris menjadi salah satu potensi kerja sama Indonesia-AS dalam mengatasi isu perubahan iklim. Dengan kebijakan luar negeri yang menekankan pada multilateralisme, diharapkan pada masa depan akan terdapat banyak potensi kerja sama Indonesia-AS di bawah pemerintahan Presiden Biden. Adapun permasalahan yang hendak dianalisis secara singkat dalam tulisan ini adalah arah kebijakan luar negeri AS di bawah Presiden Joe Biden dan potensi kerja sama Indonesia dan AS dengan menggunakan naskah pidato Presiden Biden sebagai sumber acuan.

Arah Kebijakan Luar Negeri Presiden Biden

Arah kebijakan luar negeri yang diambil oleh Presiden Joe Biden lebih menekankan pada kebijakan multilateralisme dan diplomasi sebagai intinya. Multilateralisme memang bukan sebuah kebijakan yang sempurna tetapi kebijakan ini masih menjadi pilihan terbaik dalam menyelesaikan

permasalahan politik luar negeri. Dengan mengedepankan kebijakan multilateralisme, AS akan menarik tarif unilateral yang sebelumnya diterapkan oleh Presiden Donald Trump. Terdapat tiga hal yang dapat dilakukan AS dalam melaksanakan kebijakan multilateralisme, yakni: pertama, memberikan komitmennya pada mitigasi pandemi melalui kerja sama multilateral, termasuk di dalamnya dengan menjadikan PBB lebih responsif dan efektif serta memperkuat Organisasi Kesehatan Dunia (*World Health Organization/WHO*) untuk mengatasi pandemi Covid-19; kedua, aktif terlibat dalam upaya memelihara perdamaian dan stabilitas, baik di dunia maupun kawasan; ketiga, kembali menjadi bagian utama dalam pembangunan tatanan ekonomi dunia yang kokoh dan berkelanjutan.

Arah kebijakan luar negeri yang menekankan pada multilateralisme dan diplomasi juga terlihat dari banyaknya anggota kabinet pilihan Presiden Biden yang memiliki pengalaman diplomasi dan dalam mengurus kerja sama multilateral serta menitikberatkan arah kebijakannya ke kawasan Asia. Saat ini kawasan Asia sudah menjadi kawasan dengan pertumbuhan ekonomi yang paling dinamis. Bahkan, China, Jepang, dan ASEAN diperkirakan akan menjadi kekuatan ekonomi dunia pada tahun 2030.

Di bawah kepemimpinan Presiden Biden, sikap AS terhadap China tidak akan berubah. China masih tetap dianggap sebagai penantang yang tidak dapat diabaikan. China merupakan penantang pada nilai-nilai

kemakmuran, keamanan, dan demokrasi yang selama ini dianut oleh AS. Bahkan, AS akan mengkonfrontasi penyalahgunaan ekonomi China, melawan tindakan agresifnya untuk mendorong kembali serangan China terhadap Hak Asasi Manusia, kekayaan intelektual, dan pemerintahan global. Oleh karena itu dari empat pejabat utama di Divisi Indo-Pasifik Dewan Keamanan Nasional AS, ada dua pejabat yang fokus untuk mengurus China, yakni Kurt Campbell dengan posisi sebagai koordinator isu Indo-Pasifik dan Laura Rosenberger sebagai direktur senior urusan China. Kendati demikian, jika memang menjadi kepentingan negara AS maka Presiden Biden menyatakan kesiapannya untuk bekerja sama dengan China. Di samping itu, Taiwan akan menjadi salah satu kunci dalam dinamika AS-China. Meskipun AS mengakui bahwa Beijing merupakan satu-satunya Pemerintahan China yang sah, namun AS tetap menjalin hubungan baik dengan Taiwan. Bahkan, Perwakilan Taiwan pun telah diundang pada saat pelantikan Presiden Biden.

Walaupun arah kebijakan luar negerinya lebih fokus ke kawasan Asia, namun Presiden Biden juga memastikan tidak akan merelokasi Kedutaan Besar AS di Israel ke Yerusalem. Kendati demikian, Presiden Biden telah memikirkan cara terbaik untuk memastikan masa depan Israel sebagai negara Yahudi dan demokratis. Presiden Biden pun akan berupaya untuk memberikan Palestina sebuah negara yang menjadi haknya melalui solusi dua negara dengan merujuk pada berbagai resolusi PBB

maupun parameter internasional yang disepakati.

Potensi Kerja Sama Bilateral Indonesia-AS

Kerja sama bilateral Indonesia-AS sudah berlangsung lama dan semakin diperkuat dengan adanya Kemitraan Strategis Indonesia-AS yang telah diluncurkan pada 2015 saat Barack Obama menjadi Presiden AS. Pada saat itu, Presiden Biden masih dalam posisi sebagai Wakil Presiden. Dengan terpilihnya Biden sebagai Presiden AS, maka kemitraan ini dapat kembali diperkuat sehingga menjadi potensi untuk membangun kerja sama yang saling menguntungkan dan saling menghormati bagi kedua negara.

Di samping itu, dengan terpilihnya Presiden Biden, ada beberapa potensi kerja sama yang dapat diperoleh Indonesia, antara lain: pertama, potensi untuk semakin memperkuat nilai mata uang rupiah sebagai akibat dari sentimen pasar global terhadap dollar AS; kedua, potensi untuk meningkatkan kembali komoditas ekspor Indonesia (seperti tekstil) ke AS karena pulihnya perekonomian AS dengan adanya kebijakan stimulus fiskal; ketiga, potensi untuk mendorong kenaikan harga komoditas ekspor Indonesia, seperti batu bara dan minyak sawit mentah (*crude palm oil/CPO*) serta menaikkan volume ekspor perdagangan Indonesia ke AS; keempat, potensi untuk membuka kerja sama ekonomi yang lebih luas lagi di antara kedua negara; kelima, potensi untuk semakin mempermudah pemberian beasiswa, penelitian, pergerakan tenaga ahli, serta sektor kesehatan untuk bermitra dan berkarya pada

pasar AS dengan terbukanya tenaga kerja migran.

Potensi kerja sama Indonesia-AS lainnya adalah dengan memanfaatkan fasilitas sistem preferensi tarif umum atau *generalized system of preference* (GSP). GSP merupakan fasilitas pembebasan tarif bea masuk yang diberikan secara unilateral oleh AS kepada negara-negara berkembang di dunia sejak tahun 1974. Indonesia pertama kali mendapat GSP pada 1980.

Fasilitas GSP resmi diperpanjang oleh AS untuk Indonesia pada November 2020. Fasilitas GSP harus terus diperkuat pelaksanaannya karena akan menguntungkan kedua negara. Pada Januari-Agustus 2020, nilai ekspor Indonesia yang menggunakan fasilitas GSP tercatat 1,87 miliar dollar AS atau naik 10,6 persen dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2019. (Kompas, 21 Januari 2021).

Indonesia juga telah memiliki kelompok kerja peningkatan ekspor untuk isu GSP dan non-GSP, mengajukan proposal perjanjian dagang akses GSP tanpa syarat, dan revitalisasi dialog perdagangan dan investasi pada paruh pertama 2021. Namun fasilitas GSP ini dicabut

AS dari Turki, India, dan Thailand. Jenis produk yang masuk ke AS dari ketiga negara tersebut melalui skema GSP hampir sama dengan Indonesia sehingga memunculkan peluang untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan, karena AS masih membutuhkan barang-barang ekspor dari Turki, India, dan Thailand.

AS merupakan mitra dagang terbesar ke-4 bagi Indonesia setelah China, Jepang, dan Singapura. Adapun komoditas dari Indonesia yang diekspor ke AS antara lain makanan laut, karet, sepatu kulit, baju, alas kaki, furnitur, dan minyak kelapa sawit. Selain itu, Indonesia juga akan terus mendorong pembentukan *Limited Trade Deal* (LTD). Kesepakatan ini berpotensi mendongkrak volume perdagangan Indonesia-AS hingga mencapai 60 miliar dollar AS dalam beberapa tahun ke depan.

Berdasarkan Tabel 1, total perdagangan Indonesia-AS sejak tahun 2015 sampai tahun 2018 menunjukkan adanya peningkatan dan Indonesia pun memperoleh surplus dari perdagangan kedua negara. Nilai perdagangan Indonesia-AS mengalami penurunan pada tahun 2019 dan 2020 akibat pandemi Covid-19 yang memberikan

Tabel 1 Nilai Perdagangan Indonesia-Amerika Serikat Tahun 2015-2020
(dalam miliar dolar AS)

	Tahun					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020*
Ekspor	16,24	16,14	17,79	18,44	17,84	16,75
Impor	7,59	7,30	8,12	10,18	9,26	7,77
Total	23,83	23,44	25,92	28,62	27,11	24,52
Neraca	8,65	8,84	9,67	8,26	8,58	8,98

Sumber: *Bisnis Indonesia*, 20 Januari 2021, hal 14.

Ket: *Januari-November 2020

dampak negatif terhadap perekonomian di seluruh dunia. Kendati mengalami penurunan terkait nilai perdagangan, namun Indonesia masih memperoleh keuntungan dari kerja sama perdagangan dari kedua negara. Dari tabel ini juga diketahui bahwa sepanjang Januari-November tahun 2020, nilai perdagangan Indonesia dan AS tercatat senilai 24,52 miliar dollar AS. Dari nilai ini, Indonesia mengalami surplus perdagangan hampir sebesar 9 miliar dollar AS. Ekspor non-migas Indonesia ke AS telah mencapai 16,75 miliar dollar AS sepanjang Januari-November 2020. Jumlah ini meningkat 3,82 persen dari periode yang sama pada tahun sebelumnya.

Di samping itu, dengan adanya pandemi Covid-19, AS sedang mencari lokasi baru di luar China untuk sebagian investasi luar negerinya. Di bawah kepemimpinan Presiden Biden, potensi kerja sama Indonesia-AS diharapkan dapat meningkatkan investasi AS ke Indonesia karena Indonesia memiliki iklim investasi yang bagus dan dekat dengan sumber daya yang dibutuhkan AS. Potensi kerja sama lain yang diharapkan dapat meningkat adalah sektor industri alat kesehatan dan sektor pertahanan.

Penutup

Jelas terlihat bahwa arah kebijakan luar negeri AS di bawah Presiden Biden akan mengedepankan multilateralisme. Dalam mengatasi pandemi, AS akan mengedepankan kerja sama multilateral dengan memperkuat peran PBB dan WHO. AS pun akan menekankan kerja sama multilateral melalui jalur diplomasi sehingga AS

dapat kembali menjadi aktor utama dalam politik dunia, termasuk dalam memelihara perdamaian dan stabilitas global serta kawasan.

Di bawah kepemimpinan Presiden Biden, kawasan Asia juga menjadi fokus dari arah kebijakan luar negeri AS. Presiden Biden menganggap penting memperkuat kerja sama dengan negara-negara Asia. Kendati demikian, AS masih menganggap China sebagai pesaing utamanya dan menjadi ancaman paling serius di masa depan, terutama di kawasan Asia. Oleh karena itu, AS membutuhkan Indonesia untuk mengatasi ancaman dari China di kawasan Asia. Di bawah kepemimpinan Presiden Biden, posisi tawar Indonesia juga berpotensi semakin meningkat karena Indonesia merupakan mitra strategis AS.

Referensi

- “Angin Perubahan dari Biden”, Kompas, 1 Februari 2021, hal. 4.
- “AS Tetap Akui Ibu Kota Jerusalem”, Media Indonesia, 21 Januari 2021, hal. 14.
- “AS Bergabung lagi dalam Mengatasi Perubahan Iklim”, Kompas, 26 Januari 2021, hal. 4.
- “Berharap Efek Biden”, Bisnis Indonesia, 21 Januari 2021, hal. 1.
- “Biden Bawa AS Masuki Era Baru”, Kompas, 20 Januari 2021, hal. 1 dan 15.
- “Indonesia Berharap AS Perkuat Multilateralisme”, Kompas, 22 Januari 2021, hal. 1 dan 15.
- “Isu Nuklir Serta Pemilu dalam Tarikan antara Israel, Iran dan AS”, Kompas, 31 Januari 2021, hal. 2.
- “Joe Biden Akui China Sebagai Pesaing Paling Serius Bagi

AS", <https://news.detik.com/internasional/joe-biden-akui-china-sebagai-pesaing-paling-serius-bagi-as>, diakses 6 Februari 2021.

"Joe Biden: Diplomasi Menjadi Inti dari Kebijakan Luar Negeri AS", <https://www.liputan6.com/global/read/4475885/joe-biden-diplomasi-menjadi-inti-dari-kebijakan-luar-negeri-as>, diakses 6 Februari 2021.

"Kedubes AS Tetap di Yerusalem", *Republika*, 21 Januari 2021, hal. 4.

Kuncahyono, Trias, "Joe Biden: Pasifis dan Multikulturalis", *Kompas*, 25 Januari 2021, hal. 7.

Marsudi, Retno L.P, "Harapan Pada Biden-Harris", *Kompas*, 21 Januari 2021, hal. 6.

"Pelibatan AS di Asia Beri Harapan

Pada RI", *Kompas*, 20 Januari 2021, hal 4.

"Relasi China-SA di Era Biden", *Kompas*, 23 Januari 2021, hal 6.

"Stimulus Biden Bisa Kerek Ekspor", *Bisnis Indonesia*, 20 Januari 2021, hal 14.

"Ujian Tambahan Biden", *Kompas*, 4 Februari 2021, hal 6.



Lisbet

lisbet.sihombing@dpr.go.id

Lisbet, SIP., M.Si., menyelesaikan pendidikan S1 Hubungan Internasional di Universitas Nasional pada tahun 2005 dan pendidikan S2 Hubungan Internasional di Universitas Indonesia pada tahun 2008. Saat ini menjabat sebagai Peneliti Muda Masalah-Masalah Hubungan Internasional pada Pusat Penelitian-Badan Keahlian DPR RI. Beberapa karya tulis ilmiah yang telah dipublikasikan melalui jurnal dan buku, antara lain: "Kebijakan Luar Negeri Presiden Susilo Bambang Yudhoyono Dalam Upaya Meningkatkan Kerja Sama Perdagangan Luar Negeri Indonesia" (2014), "Diplomasi Ekonomi Presiden Joko Widodo di Bidang Pariwisata" (2015), dan "Pengelolaan Keamanan Perbatasan Darat Indonesia-Malaysia Pada Era Presiden Joko Widodo di Provinsi Kalimantan Barat dan Kalimantan Utara" (2017).

Info Singkat

© 2009, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI
<http://puslit.dpr.go.id>
ISSN 2088-2351

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi tulisan ini tanpa izin penerbit.